

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Jakarta Mulai Nonaktifkan 92.493 KTP

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mulai menonaktifkan KTP warga yang meninggal dan yang tinggal tidak sesuai dengan domisili. Komisi A DPRD DKI Jakarta mengingatkan jangan sampai timbul masalah baru dan penting mengoptimalkan layanan bantuan di kelurahan agar warga tidak kerepotan.

Penonaktifan KTP ini sudah direncanakan sejak tahun lalu untuk keakuratan data kependudukan di Jakarta. Untuk tahap awal, telah diajukan penonaktifan 92.493 KTP yang terdiri dari 81.119 warga meninggal dan 11.374 warga yang tinggal di RT berbeda ke Kementerian Dalam Negeri.

"Sudah diajukan ke kementerian dan mulai dinonaktifkan," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terlebih dulu memverifikasi dan memvalidasi 92.493 KTP tersebut. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, dinas kependudukan dan pencatatan sipil bersurat ke Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berwenang menonaktifkan data kependudukan.

Warga dapat mengecek status kependudukan melalui laman <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/> atau melalui Whatsapp JAWARA pada nomor 081285277751. Bagi warga yang terdampak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan bantuan di kelurahan. Mereka dapat menyesuaikan kembali data kependudukan agar KTP kembali aktif dalam kurun 1 x 24 jam.

Budi menyebutkan, penonaktifan KTP tidak berlaku bagi warga Jakarta yang sedang bertugas atau mengenyam pendidikan di luar kota dan

luar negeri, serta mereka yang masih memiliki aset rumah di Jakarta. Terkait dengan kepemilikan aset rumah ini akan ada verifikasi dan validasi, serta penyesuaian data kependudukan.

"Warga terdampak bisa langsung datang ke loket pelayanan di kelurahan untuk penyesuaian data kependudukan atau mengaktifkan kembali KTP-nya," kata Budi.

Seiring dengan berjalannya kebijakan ini, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar jangan sampai timbul masalah baru. Keberadaan layanan di kelurahan juga mesti optimal supaya warga tidak kerepotan.

Tak ada masalah

Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, tak ingin ada masalah baru lantaran sosialisasi tentang kebijakan ini belum optimal. Dinas terkait wajib

memastikan betul status warga yang tinggal tidak sesuai dengan domisili.

"Warga tinggal di luar Jakarta bisa karena tugas ke luar kota, pendidikan, faktor sosial, dan ekonomi. Hal ini harus dipastikan betul sebelum penonaktifan KTP karena menyangkut hak warga," tutur Rio.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, juga mengingatkan hal tersebut karena banyak warga Jakarta yang tinggal di wilayah tetangga akan terdampak kebijakan ini. Layanan di kelurahan harus optimal dalam menangani dan menyelesaikan keluhan warga nantinya.

"Program ini bagus untuk akurasi data, khususnya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Namun, prosesnya harus baik dari penyisiran data, sosialisasi, hingga penanganan aduan warga," kata William. (DAN)